



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka
Telp. (0233) 281074 Fax. (0233) 281134
Website : <http://www.pn-majalengka.go.id>



**LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2019**

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-nya sehingga Pengadilan Negeri Majalengka melewati tahun 2019 dengan lancar tanpa hambatan yang berarti sehingga Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 telah disusun dan dapat tersusun dan tersajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Majalengka. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 hal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Dengan telah berakhirnya tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI sebagaimana Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Majalengka. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019 ini disusun sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan perencanaan juga sebagai acuan untuk penyempurnaan tugas-tugas pada tahun yang akan datang sehingga segala hambatan dan kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan professional.

Kami menyadari Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II pada masa-masa yang akan datang.

Majalengka, Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II

Ttd.

ETI KOERNIATI, S.H.,M.H.
NIP.19730609 199903 2002

PENGANTAR	i
Daftar ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Majalengka	5
- Keadaan Perkara Tingkat pertama.....	
- Keadaan Perkara Tingkat Bading.....	
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	
B. Penyelesaian Perkara	9
- Jumlah sisa perkara yang diputus.....	9
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	10
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Pk	10
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	11
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	11
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	11
- Posbakum.....	11
- Sidang Keliling.....	11
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara).....	12
BAB III Sumber Daya Manusia	13
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan Mutasi	18
- Promosi	18
- Pensiun	19
- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti diklat).....	19
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	20
A. Pengelolaan Keuangan.....	20
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	21
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	31
- Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri	

	Majalengka	32
	- Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Majalengka	32
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik	33
	- Akreditasi Penjaminan Mutu	33
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	34
	- Inovasi Pelayan Publik	36
BAB VI	Pengawasan	42
	A. Internal	42
	B. Evaluasi	47
BAB VII	Penutup	48
	A. Kesimpulan	48
	B. Rekomendasi	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

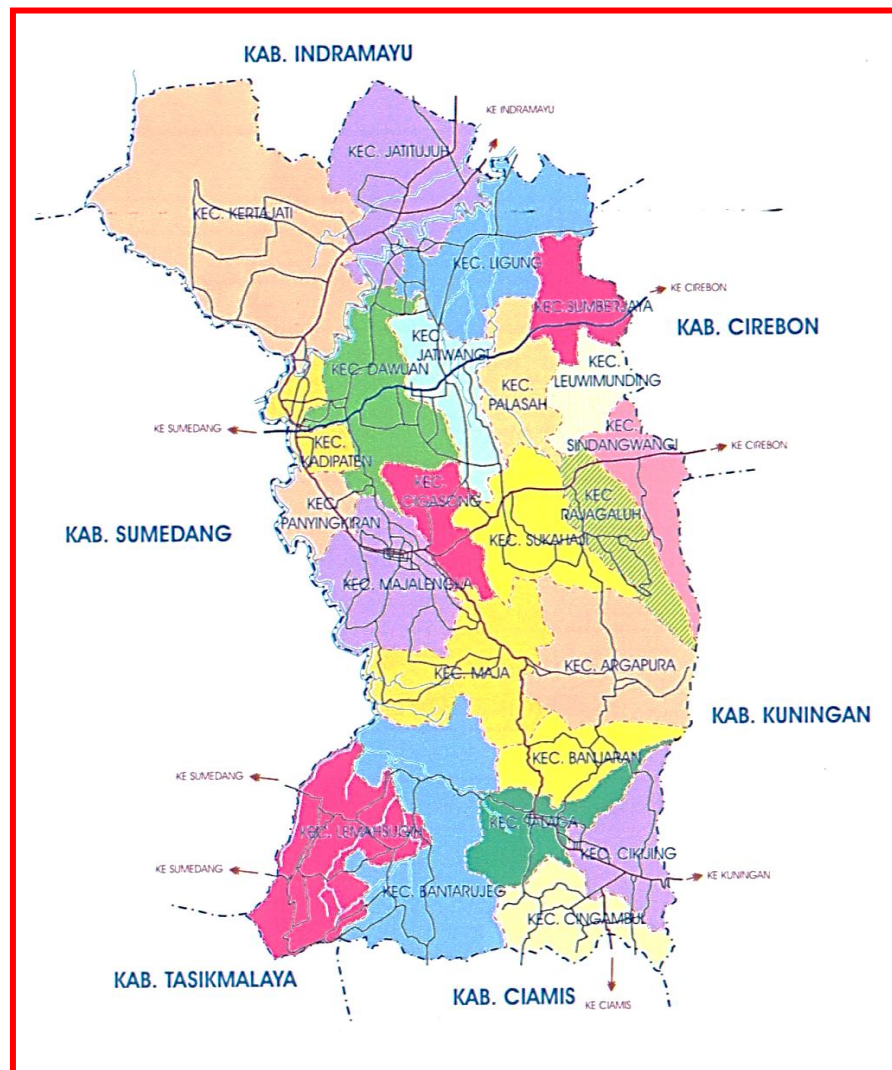
Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (demikian ayat 1 dan 2 pasal 24 UUD 1945). Peradilan Umum salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 UU No.8 tahun 2004)

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II sebagai institusi dalam jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas selain terkait dengan tugas pokok dalam penegakan hukum, pengadilan juga mempunyai tugas-tugas ekstra yudisial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Reformasi birokrasi yang saat ini sedang berjalan di jajaran Mahkamah Agung, menuntut terciptanya peningkatan disiplin kerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas serta semakin membaiknya hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik. Tuntutan itu yang saat ini sedang dalam proses dan menjadi target untuk secepat mungkin dapat diwujudkan, tentunya dibutuhkan adanya niat, kemauan dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran pelaksana tugas yang ada.

Pengadilan Negeri Majalengka telah mencoba untuk melakukan pembenahan, baik yang menyangkut upaya peningkatan sumber daya manusia baik para hakim dan seluruh pegawainya, kedepan diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai integritas, tanggung jawab serta profesionalisme yang tinggi, pembenahan untuk tercapainya tertib administrasi dan juga pembenahan menyangkut sarana dan prasarana yang ada.

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II berkedudukan di Kabupaten Majalengka yang wilayah kewenangannya meliputi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.1
Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang - undang No 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Tujuan penyampaian laporan ini dalam rangka bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam hal kemampuan,

kendala yang dihadapi serta memberikan pelaporan tercapainya independensi dan akuntabilitas peradilan.

B. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II Tahun 2014-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2014-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2014-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II
4. Meningkatkan Kerebilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi, Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri dapat memenuhi memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

D. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam bentuk yang lebih jelas dan rinci dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II adalah :

1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
2. Peningkatan penyelesaian perkara
3. Peningkatan tertib administrasi perkara
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum
6. Peningkatan kualitas pengawasan
7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
8. Peningkatan pelayanan peradilan.
9. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
10. Peningkatan penyelesaian eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT
11. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan
12. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan
13. Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)

BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Majalengka

Perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II terdiri dari perkara Perdata dan Perkara Pidana. Jumlah Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka pada tahun 2019 sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Perkara

a. Pidana

a.1. Pidana Biasa

NO	PERKARA PIDANA BIASA	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2018	39
2	Masuk Dalam Tahun 2019	261
3	Putus Tahun 2019	249
4	Sisa Tahun 2019	51
5	Terdakwa / Jaksa Menerima	353/249
6	Terdakwa / Jaksa Minta Banding 2019	1/5
7	Terdakwa / Jaksa Minta Kasasi 2019	-/-
8	Terdakwa / Jaksa Minta Grasi 2019	-/-
9	PK (Peninjauan Kembali)	-/-

a.2. Pidana Anak

NO	PERKARA PIDANA ANAK	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2018	-
2	Masuk Dalam Tahun 2019	9
3	Putus Tahun 2019	8
4	Sisa Tahun 2019	1
5	Terdakwa / Jaksa Menerima	10/9
6	Terdakwa / Jaksa Minta Banding 2019	-/-
7	Terdakwa / Jaksa Minta Kasasi 2019	-/-
8	Terdakwa / Jaksa Minta Grasi 2019	-/-
9	PK (Peninjauan Kembali)	-/-

a.3. Pidana Khusus

NO	PERKARA PIDANA KHUSUS	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2018	-
2	Masuk Dalam Tahun 2019	-
3	Putus Tahun 2019	-
4	Sisa Tahun 2019	-
5	Terdakwa / Jaksa Menerima	-
6	Terdakwa / Jaksa Minta Banding 2019	-/-
7	Terdakwa / Jaksa Minta Kasasi 2019	-/-
8	Terdakwa / Jaksa Minta Grasi 2019	-/-
9	PK (Peninjauan Kembali)	-/-

a.4. Praperadilan

NO	PERKARA PIDANA PRAPERADILAN	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2018	-
2	Masuk Dalam Tahun 2019	-
3	Putus Tahun 2019	-
4	Sisa Tahun 2019	-
5	Terdakwa / Jaksa Menerima	-
6	Terdakwa / Jaksa Minta Banding 2019	-
7	Terdakwa / Jaksa Minta Kasasi 219	-
8	Terdakwa / Jaksa Minta Grasi 2019	-
9	PK (Peninjauan Kembali)	-

a.5. Pidana Cepat

No	PIDANA CEPAT	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2018	-
2	Masuk Dalam Tahun 2019	10
3	Putus Tahun 2019	10
4	Kasasi	-
5	Grasi	-

a.6. Pidana Lalu Lintas

No	PIDANA CEPAT	JUMLAH
1	Sisa Tahun 218	-
2	Masuk Dalam Tahun 2019	23.229
3	Putus	22.979
4	Sisa	250*

Ket :

* Pelimpahan tgl 30-12-2019 untuk sidang tgl 3-1-2020.

b. Perdata

Keadaan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

b.1. Perkara Perdata Gugatan

No	Perkara Perdata Gugatan	Jumlah (Perkara)
1	Sisa tahun 2018	5
2	Masuk dalam tahun 2019	16
3	Putus dalam tahun 2019	12
4	Dicabut	4
5	Para Pihak Menerima	10
6	Para Pihak Minta Banding	1
7	Para Pihak Kasasi	1
8	PK (Peninjauan Kembali)	1
9	Dilaksanakan	1
10	Sisa tahun 2019	5

b.2. Perkara Perdata Gugatan Sederhana

No	Perkara Perdata Gugatan	Jumlah (Perkara)
1	Sisa tahun 2018	-
2	Masuk dalam tahun 2019	6
3	Putus dalam tahun 2019	3
4	Dicabut	3

5	Para Pihak Menerima	3
6	Para Pihak Minta Banding	-
7	Para Pihak Kasasi	-
8	PK (Peninjauan Kembali)	-
9	Dilaksanakan	-
10	Sisa tahun 2019	-

b.3. Perkara Perdata Permohonan

No	Perkara Perdata Permohonan	Jumlah (Perkara)
1	Sisa tahun 2018	3
2	Masuk dalam tahun 2019	49
3	Putus dalam tahun 2019	43
4	Dicabut	6
5	Gugur	1
6	Sisa tahun 2019	2

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

NO	NAMA	PERKARA PUTUS
1.	PIDANA BIASA	249
2.	PIDANA KHUSUS	-
3.	PIDANA SINGKAT	-
4.	PIDANA PRAPERADILAN	-
5.	PIDANA CEPAT	10
6.	PIDANA LALU LINTAS	22.979
7.	PIDANA KHUSUS ANAK	8
8.	PERDATA GUGATAN	16
9.	PERDATA GUGATAN SEDERHANA	6
10.	PERDATA PERMOHONAN	50

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.

NO	NAMA	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK UPAYA HUKUM
1.	PIDANA BIASA	249
2.	PIDANA KHUSUS	0
3.	PIDANA SINGKAT	0
4.	PIDANA PRAPERADILAN	0
5.	PIDANA CEPAT	10
6.	PIDANA LALU LINTAS	22.979
7.	PIDANA KHUSUS ANAK	39
8.	PERDATA GUGATAN	4
9.	PERDATA GUGATAN SEDERHANA	3
10.	PERDATA PERMOHONAN	43

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Nihil

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Nihil

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

	NAMA	SISA TAHUN 2018	PERKARA MASUK	PERKARA PUTUS	PERKARA DICABUT	SISA TAHUN 2019
1.	PIDANA BIASA	39	261	249	0	51
2.	PIDANA KHUSUS	-	-	-	-	-
3.	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	-
4.	PIDANA PRAPERADILAN	-	-	-	-	-
5.	PIDANA CEPAT	1	11	11	-	1
6.	PIDANA LALU LINTAS	-	23.229	22.979	-	250
7.	PIDANA KHUSUS ANAK	2	9	9	-	2
8.	PERDATA GUGATAN	5	16	12	4	5
9.	PERDATA GUGATAN SEDERHANA	-	6	3	3	-

10.	PERDATA PERMOHONAN	3	49	44	6	2
11.	PERDATA PERLAWANAN/ BANTAHAN	-	1	-	-	1

Ket : gugur 1 perkara perdata permohonan.

3. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

NO	NAMA	PERKARA PUTUS
1.	PIDANA BIASA	249
2.	PIDANA KHUSUS	-
3.	PIDANA SINGKAT	-
4.	PIDANA PRAPERADILAN	-
5.	PIDANA CEPAT	10
6.	PIDANA LALU LINTAS	22.979
7.	PIDANA KHUSUS ANAK	8
8.	PERDATA GUGATAN	16
9.	PERDATA GUGATAN SEDERHANA	6
10.	PERDATA PERMOHONAN	50

4. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali

NO	NAMA	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK UPAYA HUKUM
1.	PIDANA BIASA	249
2.	PIDANA KHUSUS	0
3.	PIDANA SINGKAT	0
4.	PIDANA PRAPERADILAN	0
5.	PIDANA CEPAT	10
6.	PIDANA LALU LINTAS	22.979
7.	PIDANA KHUSUS ANAK	39
8.	PERDATA GUGATAN	4
9.	PERDATA GUGATAN SEDERHANA	3
10.	PERDATA PERMOHONAN	43

5. Jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi
Null/Nihil
6. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
Nihil

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan Negeri. Dalam pemberian bantuan tersebut Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II melakukan kerjasama dengan Advokat Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II.

Adapun alokasi dana Posbakum pada DIPA Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II untuk tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

DIPA Awal	Realisasi	Sisa
24.000.000	24.000.000	0

- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II , tidak melaksanakan / tidak ada sidang keliling.

NO	SIDANG KELILING	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2018	-
2	Masuk Dalam Tahun 2019	-
3	Putus Tahun 2019	-
4	Sisa Tahun 2019	-

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bahwa di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II tahun anggaran 2019 tidak ada anggaran untuk perkara prodeo.

NO	PERKARA PRODEO	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2018	-
2	Masuk Dalam Tahun 2019	-
3	Putus Tahun 2019	-
4	Sisa Tahun 2019	-

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang berjumlah 42 Orang dengan 21 Tenaga Teknis , 21 Tenaga Non Teknis (8 orang Kesetariatan, 4 orang Calon Hakim dan 9 Orang Tenaga Kontrak) dirasakan kurang memadai apabila dilihat secara objektif khususnya tenaga administrasi golongan I dan II terutama operator di bidang IT (Information Teknologi) dan Pengadministrasi Umum, sehingga dengan kondisi tersebut masih ada Tenaga Teknis yang merangkap tugas sebagai Pengadministrasi Umum maupun Pencatat Register Perkara. Meskipun demikian sampai saat ini Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II mengusahakan agar tenaga-tenaga yang ada dapat melaksanakan tugas tambahan semaksimal mungkin sehingga dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik.

Profil Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL / RUANG	KET.
1	ETI KOERNIATI, S.H.,M.H.	Ketua	Pembina Tk.I	IV/b	
	-	Wakil Ketua	-	-	
2	KOPSAH, S.H., M.H.	Hakim	Penata TK.I	III.d	
3	DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.	Hakim	Penata TK.I	III.d	
4	AGUSTA GUNAWAN, S.H.	Hakim	Penata TK.I	III.d	
5	RIA AGUSTIN, S.H.	Hakim	Penata TK.I	III.d	
6	RINI ADRIANI S. S.H., M.H.	Hakim	Penata	III/c	
7	IDA ADRIANA, S.H.	Hakim	Penata	III/c	
8	JAYA BHAKTI, S.H.	Panitera	Penata Tk.I	III/d	
9	HERNY, S.H.	Panmud Perdata	Penata Tk.I	III/d	
10	JAJANG SOFYAN, S.H.	Sekretaris	Penata Muda Tk.I	III/b	
11	YEYET MULYATI, S.H.	Panitera Pengganti	Penata TK.I	III/d	
12	OTONG ENDANG K, Sm.Hk	Panmud Perdata	Penata	III/c	
13	BENNY CAHYONO, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Penata	III/c	

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL / RUANG	KET.
14	ASEP SUMARTONO	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
15	NENEH SUMARSIH	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
16	KARNEDY	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
17	MEME	Kasub Keuangan Dan Umum	Penata	III/c	
18	IMAS SURYATI	Kasub Kepegawaian dan Ortalak	Penata	III/c	
19	LUKMAN HAKIM, S.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
20	ONO SUKARTONO	Jurusita	Penata Muda Tk.I	III/b	
21	M. SADIKIN, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	
22	ASEP WAWAN	Kasub Perencanaan, TI, Dan Pelaporan	Penata Muda Tk.I	III/b	
23	HENDRA DARMAWAN, S.E.	Staf Keuangan	Penata Muda Tk.I	III/c	
24	YUDI ADI SOAMANTRI, SH	Jurusita	Penata Muda Tk.I	III/b	
25	ARNOLD RAY KAMBA, Amd,SH	Jurusita	Penata Muda	III/a	
26	PURWANI WAHYUNINGSIH	Jurusita Pengganti	Pengatur	II/d	
27	MEMED SUDARMA	Staf Kepegawaian	Pengatur Muda	II/b	
28	SANDYANA ABDUROCHIM, S.H.	Staf Umum	Pengatur Muda	II/b	
29	S A R M A N	Staf Umum	Juru Muda	I/b	

b. Sumber Daya Manusia Calon Hakim

NO	NAMA	JABATAN	Pangkat	Gol/ Ruangan	KET.
1	R. KEMALA NABABAN, S.H.	Cakim	Penata Muda	III/a	
2	AMELIA DEVINA PUTRI, S.H.	Cakim	Penata Muda	III/a	
3	YOLA ESKA AFRINA SIHOMBING, S.H.	Cakim	Penata Muda	III/a	
4	INGGRID HOLONITA DOSI, S.H.	Cakim	Penata Muda	III/a	

c. Sumber Daya Manusia Tenaga Kontrak

NO	NAMA	JABATAN	SK TMT	KET.
1	NOLI LIA KOMALASARI, S.H.	CLEANING SERVICE	24 – 07 –2006	Diperbantukan di Kepegawaian
2	MUHAMAD HARIS GARTIKA	DRIVER	14 – 09 –2006	Diperbantukan di Kepaniteraan Hukum
3	MOH. RONNY PRIYANTO, S.H.	DRIVER	03 – 03 –2008	Diperbantukan di Sub. Bag. Umum dan Keuangan
4	AEF SAEPULOH	SECURITY	02 – 01 –2012	-
5	TOTOH TOHID HERMANSYAH	CLEANING SERVICE	02 – 01 –2012	Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana
6	UDIN MUHIDIN	CLEANING SERVICE	02 – 01 –2012	Diperbantukan di Kepaniteraan Perdata
7	QODAR RIYADI, S.H.	CLEANING SERVICE	07 – 09 –2013	Diperbantukan di Sub Bag. PTIP
8	RISA MINAWATI	CLEANING SERVICE	07 – 09 –2013	Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana
9	IWAN HERMAWAN	SECURITY	07 – 09 –2013	-

d. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Hakim (Ketua / Wakil)	2	5	7
2	Hakim ad hoc (PHI)	-	-	-
3	Panitera	1	-	1
4	Wakil Panitera	-	-	-
5	Panitera Muda Pidana	1	-	1
6	Panitera Muda Perdata	-	1	1
7	Panitera Muda Hukum	1	-	1
8	Panitera Pengganti	4	2	6
9	Jurusita	3	-	3
10	Jurusita Pengganti	-	1	1
Jumlah		12	9	21

e. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kasubag Umum dan Keuangan	1	-	1
3	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-	1	1
4	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	-	1
5	Staff	4	-	4
6	Calon Hakim	-	4	4
7	Tenaga Kontrak	7	2	9
Jumlah		14	7	21

f. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

NO	PANGKAT GOL/RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Golongan IV	-	1	1
2	Golongan III	16	12	28
3	Golongan II	2	1	3
4	Golongan I	1	-	1
5	Tenaga Kontrak	7	2	9
Jumlah		26	16	42

Golongan IV

NO	PANGKAT GOL/RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
4	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	1
5	Pembina (IV/a)	-	-	-
Jumlah		-	1	1

Golongan III

NO	PANGKAT GOL/RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Penata Tk.I (III/d)	3	4	7
2	Penata (III/c)	7	4	11
3	Penata Muda Tk.I (III/b)	5	-	5
4	Penata Muda (III/a)	1	4	5
Jumlah		16	12	28

Golongan II

NO	PANGKAT GOL/RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pengatur Tk.I (II/d)	-	1	1
2	Pengatur (II/c)	-	-	-
3	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2	-	2
4	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Jumlah		2	1	3

Golongan I

NO	PANGKAT GOL/RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Juru Tk.I (I/d)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Muda Tk.I (I/b)	1	-	1
4	Juru Muda (I/a)	-	-	-
Jumlah		1	-	1

Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak

NO	PANGKAT GOL/RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Tenaga Kontrak	7	2	9
Jumlah		7	2	9

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan

= MUTASI

a. Mutasi Masuk

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	T.M.T.
1.	SUTRISNO, SH.,M.H.	Wakil Ketua PN Sragen	Ketua PN Majalengka	18-01-2019
2.	ETI KOERNIATI, S.H., MH.	Wakil Ketua PN Sekayu	Wakil ketua PN Majalengka	01-02-2019
3. 4.	JAYA BHAKTI, S.H	Wakil Panitera PN Indramayu	Panitera PN Majalengka	22-03-2019
5.	JAJANG SOFYAN, S.H.	Kasubag PTIP PN Kuningan	Sekretaris PN Majalengka	26-07-2019

b. Mutasi Keluar

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	T.M.T.
1.	NENDI RUSNEDI, S.H.	Ketua PN Majalengka	Hakim PN Banda Aceh Kelas I.A	18-01-2019
2.	TIWIK, SH.,M.Hum	Wakil Ketua PN Majalengka	Ketua PN Batu Sangkar	18-01-2019
3. 4.	JAFRI, S.H.,M.H	Wakil Panitera PN Majalengka	Panitera PN Tanjung Pandan	14-02-2019
5.	BUNADI, SH., M.H.	Panitera PN Majalengka	Panitera PN Kuningan	15-03-2019
6.	JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M	Sekretaris PN Majalengka	Sekretaris PN Kuningan	11-06-2019
7.	YULLYUS RHAMDHANY, S.H	Panitera Pengganti PN Majalengka	Panitera Pengganti PN Bandung	22-08-2019
8.	SUTRISNO, SH.,M.H.	Ketua PN Majalengka	Wakil Ketua PN Ponorogo	18-11-2019

=

= **PROMOSI**

a. Jabatan

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	T.M.T.
1.	ETI KOERNIATI, S.H., MH.	Wakil	Ketua	01-02-2019

b. Pangkat

.NO	NAMA	PANGKAT LAMA	PANGKAT BARU	T.M.T.
1.	AGUSTA GUNAWAN, S.H	III/c	III/d	01 - 04 - 2019
2.	RIA AGUSTIEN, S.H	III/c	III/d	01 - 04 - 2019
3.	HENDRA DARMAWAN, S.E	III/b	III/c	01 - 04 - 2019

= **Pensiun**

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	T.M.T.
	-	-	-	-

= **Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

NO	NAMA	JENIS DIKLAT / PELATIHAN	WAKTU	TEMPAT
1.	IMAS SURYATI	Diklat PBJ	17 s.d 22 Maret 2019	Balitbang Diklatkumdil Megamendung, Bogor
2.	ASEP WAWAN	Diklat PBJ	17 s.d 22 Maret 2019	Balitbang Diklatkumdil Megamendung, Bogor
3.	HENDRA DARMAWAN. S.E.	Diklat PBJ	17 s.d 22 Maret 2019	Balitbang Diklatkumdil Megamendung, Bogor
4.	SANDYANA ABDUROCHIM, S.H.	Diklat PBJ	17 s.d 22 Maret 2019	Balitbang Diklatkumdil Megamendung, Bogor

BAB IV
Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana,
dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II. tahun Anggaran 2019 dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM).

1. Anggran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI

1.1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Belanja Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2019 Dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
4.907.958.000	4.859.151.709	48.806.296	99.01%

1.2. Program Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Belanja Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Tahun 2019 Dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
62.500.000	62.500.000	250.000	99.60. %

2. Anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI

- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Belanja Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2018 Dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
90.750.000	88.876.500	1.873.000	97,94 %

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 yang sudah disetorkan ke Kas Negara Dapat diuraikan sebagai berikut :

DIPA	Estimasi	Realisasi	Persentase
01	10.881.000	13.678.840	125.71 %
03	-	17.007.200	661.19%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor

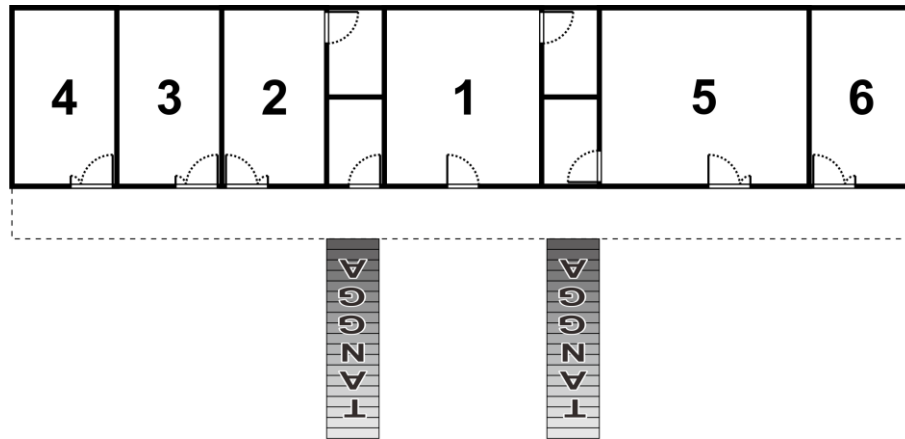
Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka, berdiri di atas tanah seluas 4340 M² dengan status Hak Milik, dengan luas bangunan sekitar 1010 M² terdiri dari 2 (dua) lantai dengan Rincian Denah sebagai berikut :



Denah Lantai 1 (satu)

Keterangan Denah Lantai 1:

1. R. PTSP
2. R. Panitera
3. R. Panitera Pengganti
4. R. Panmud Perdata
5. R. Mediasi
6. R. Panmud Hukum
7. R. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8. R. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
9. R. Umum dan Keuangan
10. R. Perpustakaan
11. R. Sidang Utama
12. R. Server
13. R. Sidang Anak
14. R. Panmud Pidana
15. R. Tahanan Wanita dan Anak
16. R. Tahanan Pria
17. R. Tunggu Pengunjung
18. R. Tunggu Jaksa
19. R. Pos Bantuan Hukum
20. R. Laktasi
21. R. Tunggu Anak
22. R. Sidang 2 (dua)
23. Gudang
24. R. Dharmmayukti Karini
25. R. Pantry/Dapur
26. Toilet / WC
27. Toilet / WC
28. R. Arsip
29. R. Arsip
30. Musholla
31. Area merokok
32. Kantin
33. Area Parkir Motor Pegawai
34. Area Parkir Mobil Pegawai
35. Area Parkir Umum
36. Pos Satpam
37. Lapangan



Denah Lantai 2 (dua)

Keterangan Denah Lantai 2 :

1. Ruang Ketua
2. Ruang Wakil Ketua
3. Ruang Wakil Panitera
4. Ruang Sekretaris
5. Ruang Hakim I
6. Ruang Hakim II

Gedung Pengadilan Negeri Majalengka
Tampak Depan



Samping Kanan



Samping Kiri



Mushola



Kantin



Ruang Sidang Utama



Ruang Sidang Dua



Ruang Sidang Anak



2. Rumah Dinas

Rumah Dinas Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II berjumlah 11 Unit, yang terdiri dari :

Data Rumah Dinas Pengadilan Negeri Majalengka

No	Nama BMN	Luas (M ²)	Alamat	Kondisi	Keterangan
1	Rumah Negara Golongan II Type C	200	Blok Rabu Jl. K.H. Abdul Halim No 140 Majalengka	Baik	Rumah Dinas Ketua
2	Rumah Negara Golongan II Type C	200	Jl. Kebon Jengkol Majalengka Kulon	Baik	Rumah Dinas Wakil Ketua (Tidak Di Huni)
3	Rumah Negara Golongan II Type C	70	Blok Sangraja Jl. Cigasong Maja Cigasong Majalengka	Baik	Rumah Dinas Hakim
4	Rumah Negara Golongan II Type C	70	Blok Sangraja Jl. Cigasong Maja Cigasong Majalengka	Baik	Rumah Dinas Hakim (Tidak Dihuni)
5	Rumah Negara Golongan II Type C	70	Blok Sangraja Jl. Cigasong Maja Cigasong Majalengka	Baik	Rumah Dinas Hakim
6	Rumah Negara Golongan II Type C	70	Blok Sangraja Jl. Cigasong Maja Cigasong Majalengka	Baik	Rumah Dinas Hakim
7	Rumah Negara Golongan II Type C	70	Blok Ahad Jl. Cicurug Majalengka Wetan	Baik	Rumah Dinas Hakim
8	Rumah Negara Golongan II Type C	70	Blok Ahad Jl. Cicurug Majalengka Wetan	Baik	Rumah Dinas Hakim
9	Rumah Negara Golongan II Type C	500	Blok Kopo Jl. Cicurug Majalengka Wetan	Rusak Ringan	Rumah Dinas Panitera (Tidak Dihuni)
10	Rumah Negara Golongan II Type C	70	Blok Kamis Jalan Trikora / Pengadilan Majalengka Kulon	Rusak Berat	Rumah Dinas Hakim (Tidak Dihuni)
11	Mess Pegawai	2000	Blok Kamis Jalan Trikora / Pengadilan Majalengka Kulon	Rusak Berat	Mess Pegawai (Tidak Dihuni)

Berikut foto-foto Kondisi Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II :



Rumah Dinas Ketua
Jl. K.H. Abdul Halim No 140 Majalengka Kulon



Rumah Dinas Wakil Ketua
Jl. Kebon Jengkol Majalengka Kulon



Rumah Dinas Hakim
Blok Sangraja Jl. Cigasong Maja - Cigasong



Rumah Dinas Hakim
Blok Sangraja Jl. Cigasong Maja - Cigasong



Rumah Hakim
Blok Ahad Jln. Cicurug Majalengka Wetan



Rumah Hakim
Blok Ahad Jln. Cicurug Majalengka Wetan



Rumah Panitera / Sekretaris
Blok Kopo Jln. Cicurug Majalengka Wetan



Rumah Hakim
Blok Kamis Jln. Trikora / Pengadilan Majalengka Kulon



Mess Pegawai
Blok Kamis Jln. Trikora / Pengadilan Majalengka



Mess Pegawai
Blok Kamis Jln. Trikora / Pengadilan Majalengka Kulon



Mess Pegawai
Blok Kamis Jln. Trikora / Pengadilan Majalengka



Mess Pegawai
Blok Kamis Jln. Trikora / Pengadilan Majalengka Kulon

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II saat ini adalah sebagai berikut :

No.	Jenis / Merk	Tahun	Nomor Polisi	Warna / Model	Kondisi	Dipergunakan Oleh	Ket.
1.	Toyota Kijang Inova	2006	E – 4 - U	Silver	Baik	Panitera	Transfer MA
2.	Toyota Avanza	2011	E – 1064 - U	Hitam	Baik	Sekretaris	DIPA 2011
3.	Yamaha LS	1979	E – 3448 - U	Merah	Rusak Berat	-	-
4.	Honda Win	1998	E – 2710 - U	Hitam	Rusak Ringan	Operasional Umum	-
5.	Honda Kharisma	2003	E – 3373 - U	Hitam	Rusak Ringan	Jurusita (Arnold)	-
6.	Honda GL-MAX	2005	E – 3483 - U	Hitam	Rusak Ringan	Operasional Staf PTIP (Sdr.Memed Sudarma)	DIPA 2005
7.	Honda Mega Pro	2005	E – 3806 - U	Hitam	Baik	Satf Umum (Sarman)	Transfer PT.Bdg
8.	Honda Mega Pro	2005	E – 3807 - U	Hitam	Ruksa Ringan		Transfer PT.Bdg
9.	Supra Fit	2007	E – 3757 - U	Hitam	Baik		DIPA 2007
10.	Supra Fit	2007	E – 3758 - U	Hitam	Baik	Panmud Pidana (Otomg Endang K.SmHk)	DIPA 2007
11.	Supra Fit	2007	E – 3759 - U	Hitam	Baik	Kepala Sub.Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	DIPA 2007
12.	Honda Mega Pro	2008	E – 3811 - U	Hitam	Baik	Bendahara	DIPA 2008
13.	Honda Mega Pro	2008	E – 3888 - U	Hitam	Baik	Jurusita	DIPA 2008
14.	Honda Mega Pro	2008	E – 3889 - U	Hitam	Baik	Staf Organisasi dan Tatalaksana (Sandyana)	DIPA 2008
15.	Honda Mega Pro	2011	E – 4627 - U	Hitam	Baik	Panmud Hukum (benny Cahyono)	DIPA 2011
16.	Honda Mega Pro	2011	E – 4623 - U	Hitam	Baik	Kepala Sub.Bagian	DIPA 2011

No.	Jenis / Merk	Tahun	Nomor Polisi	Warna / Model	Kondisi	Dipergunakan Oleh	Ket.
						Pelaporan Teknologi Informasi dan Pelaporan	
17.	Honda Revo	2011	E – 4622 - U	Hitam	Baik	Panmud Perdata (Herny,SH)	DIPA 2011
18.	Honda Mega Pro	2012	E – 4656 - U	Hitam	Baik	Kepala Sub.Bagian Umum dan Keuangan	DIPA 20112
19.	Honda Mega Pro	2012	E – 4657 - U	Hitam	Baik	Sekretaris	DIPA 2012

4. Kegiatan Pengelola Sarana dan Pra Sarana

4.1 Pengadaan

Bahwa Pada dalam Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II ada pengadaan untuk Belanja Modal Peralatan Mesin (Pengadaan Mesin lap Top) dengan uraian sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
62..500.000	62.250.000	250.000	99.60 %

4.2 Pemeliharaan

Dalam Tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II telah melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta pemeliharaan peralatan dan mesin dengan uraian sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
363.645.000	363.578.786	66.214	99.98 %

4.3 Penghapusan

Bahwa untuk kegiatan penghapusan aset dalam bentuk alat inventaris Kantor pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II masih dalam proses (menunggu persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Cirebon

C. Pengelolaan Teknologi Informasi.

Pengelolaan bidang IT (Informasi Tecnology) untuk menunjang kinerja peradilan dan berperan serta aktif dalam hal keterbukaan informasi, adapun sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP di Pengadilan Negeri Majalengka terdiri dari

1. *Perangkat Keras (Hardware)*

Sarana prasarana penunjang kinerja baik Hakim, Panitera dan Pegawai dalam proses peradilan dan Pengadministrasi tentunya membutuhkan perangkat keras pendukung baik berupa PC (Personal Computer), Laptop, Scaner, Printer, Camera Digital dan kebutuhan lainnya berikut daftar inventaris pendukung berupa hardware yang berkenan dengan bidang IT.

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Server	Buah	3
2.	Router	Buah	1
3.	Rak Server	Buah	1
4.	Jaringan Internet	Buah	2
6.	LCD Monitor	Buah	4
7.	UPS	Buah	6
8.	P.C Unit	Buah	40
10.	Laptop	Buah	19
11.	Printer	Buah	27
12.	Scanner	Buah	7

2. *Penyediaan Konektivitas Internet*

Didalam era keterbukaan informasi sangat dibutuhkan konektifitas jaringan internet, dimana jaringan internet ini menjadi salah satu jalur komunikasi bagi para penggunanya di lingkungan Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga mempermudah pengiriman paket-paket data informasi, baik teks, gambar, suara atau video. Oleh karena itu dibutuhkan konektivitas Bandwidth yang memadai.

Jalur konektivitas internet pada Pengadilan Negeri Majalengka terdapat 1 media transfer data yakni UTP dengan Subneting Mask

255.255.255.0. jaringan yang tersedia adalah 41 line user. Saat ini Pengadilan Negeri Majalengka memiliki kapasitas Bandwidth sebesar sebesar 70 Mbps.

- **Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II .**

Bahwa Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II selama Tahun 2019 menangani Perkara E-court sebagai berikut

Perkara Perdata Gugatan5 Perkara

Perkara Perdata Permohonan.....18 Perkara

- **Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II .**

SIPP PN Majalengka selama tahun 2019 data perkara yang telah terekam dalam SIPP adalah sebanyak 24.351 perkara yang terdiri dari 16 perkara Gugatan, 49 perkara Permohonan, 1 perkara Perlawanan/Bantahan (derden verzet), 6 perkara Gugatan Sederhana, 261 perkara Pidana Biasa, 11 perkara Pidana Cepat, 23.998 Perkara Lalu Lintas, dan 9 perkara Pidana Anak.

Rasio penanganan perkara tahun 2019 berdasarkan data SIPP MA per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 84,6 % . Rasio penanganan perkara tersebut tidak memperhitungkan penanganan perkara lalu lintas.

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik

- Akreditasi Penjamin Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum Dalam Memberikan Pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Dimana program Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah berlangsung sejak tahun 2015.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Paradilan.

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II pada tanggal 29 November 2017 telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor TAPM.189/QMR/SERTIFIKAT/11/2017 dengan nilai "A" (Excellent).

Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum ini akan dilaksanakan penilaian kembali setiap 6 bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2020 dengan rencana asesmen surveilan pada :

- I. Mei 2018
- II. November 2018
- III. Mei 2019
- IV. November 2019
- V. Mei 2020
- VI. November 2020



Gambar 2.2

**Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum
Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II**

- Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

PTSP ini sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/ 2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur

dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan, yaitu pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses di mulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian pelayanan baik di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan melalui satu pintu, sehingga dapat mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan terukur sesuai dengan pelayanan standar yang telah di tetapkan, serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.



Adapun Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan / yang dilayani selama tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Majalengka sebagai berikut:

NO	Sub Bidang /Bagian	Jumlah Kegiatan
1.	UMUM DAN KEUANGAN	985 Surat Masuk 2337 Surat keluar
2.	PERDATA	183 Surat masuk 306 Surat keluar
3.	PIIDANA	238 Surat Ijin Penyitaan 21 Surat Ijin Penggeledahan
4.	HUKUM	630 Surat Keterangan

- Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik yang telah berjalan di Pengadilan Negeri majalengka selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Server – Pengadilan Negeri Majalengka.

Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sedang gencar-gencarnya mengaplikasikan E-Government. Dengan sekian banyaknya aplikasi yang dibuat dan inovasi-inovasi dari berbagai instansi terkait terkadang membuat bingung para pegawai karena link atau akses aplikasi tersebut terkadang berubah-ubah dalam perkembangannya.

SERVER - PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
Bpk/Ibu Hakim & Panitera Pengganti, Harap Mengecek Aplikasi "Monitoring" Sebelum Masuk Aplikasi SIPP - Jika Ada Masalah Hubungi & Tanya Admin IT

APLIKASI -- KEPANITERAAN

INFORMASI SIPP 3.3.0-1
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

RASIO PENANGANAN PERKARA SIPP LOCAL
3.23 %

Sisa Tahun Lalu : 41 | Masuk Tahun Ini : 1
Tunggakan Perkara : 60 | Minulasi Tahun Ini : 2
Catatan : Berbeda dengan SIPP MA (karena di MA menunggu proses sinkronisasi)

APLIKASI -- KESEKRETARIATAN

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2017

Aplikasi Server – Pengadilan Negeri Majalengka adalah sebuah aplikasi shortcut yang dibuat untuk mempermudah para Pegawai di Pengadilan Negeri Majalengka dalam mengakses berbagai aplikasi lain yang digunakan dalam kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan perubahan-perubahan terkait link atau akses tersebut bisa diminimalisir dan pegawai tidak perlu lagi menghafal berbagai link

aplikasi instansi dalam melaksanakan tugasnya. Para pegawai cukup menghafal 1 link saja yaitu link Aplikasi Server – PN Majalengka yang didalamnya terdapat berbagai shortcut aplikasi, sehingga mempermudah dan lebih efisien dalam memanfaatkan waktu.

Dengan semakin cepatnya akses ke aplikasi-aplikasi tersebut maka diharapkan waktu pelayanan terhadap publik juga bisa lebih cepat.

2. Aplikasi Rol Sidang, Antrian Sidang dan Panggilan Sidang.

Aplikasi Rol Sidang, Antrian Sidang dan Panggilan Sidang adalah satu aplikasi terkait yang terhubung dengan database SIPP.

[Print to Excel](#) | [Kembali](#)

ROLL SIDANG TANGGAL 07-01-2020

Pencarian bisa dengan menuliskan potongan atau lengkap untuk nomor perkara, nama pihak, pengacara, hakim atau panitera
Untuk menampilkan kembali semua perkara klik cari dalam keadaan kosong

NO	Nomor Perkara	Jam Sidang	Ruang Sidang	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Para Pihak	Edit Kehadiran	Sudah Hadir	Siap
1	17/Pdt.G /2019/PN Mjl	11:00:00	Ruang Sidang 1	Rini Andriyani Sigalingging Ria Agustien Ida Adriana	Otong Endang Kosendar, Sm.Hk.	Penggugat : DRH SOETJI HANDAJANI Pengacara : Lily Indriati Siswanto, S.H.M.M., Dkk Tergugat : 1.H. Ikin Asikin 2.Dziky Dzirkulloh	Edit Kehadiran	- DRH SOETJI HANDAJANI - Lily Indriati Siswanto, S.H.M.M., Dkk - H. Ikin Asikin - Dziky Dzirkulloh	<input checked="" type="checkbox"/>
2	49/Pdt.P/2019/PN Mjl	10:15:00	Ruang Sidang 1	Agusta Gunawan	Otong Endang Kosendar, Sm.Hk.	Pemohon : Martono Atmaja Pengacara : Termohon :	Edit Kehadiran	- Martono Atmaja	<input checked="" type="checkbox"/>
3	253/Pdt.B /2019/PN Mjl	13:00:00	Ruang Sidang 1	Eti Koerniati Kopsah Dikdik Haryadi	Otong Endang Kosendar, Sm.Hk.	Jaksa : PATARDO SATYA, SH.,LLM. Pengacara : Terdakwa : LEONARD ADITYA Anak dari DJIE NAN FUNG Penasehat Hukum :	Edit Kehadiran	- LEONARD ADITYA Anak dari DJIE NAN FUNG	<input type="checkbox"/>

Pada saat datang ke Pengadilan, Para pihak melaporkan kehadirannya kepada petugas di meja informasi, kemudian petugas meja informasi menginput data pihak yang hadir pada Aplikasi Rol Sidang. Setelah semua pihak hadir maka nomor perkara tersebut sudah siap untuk dilaksanakan sidang.

- Antrian Sidang Pengadilan Negeri Majalengka

Pengadilan Negeri Majalengka

Pilih Ruang Sidang

Tanggal : 07-01-2020

Untuk manajemen antrian sidang, Panggil, Edit Sidang, Pindah Ruang Silahkan Pilih Sidang Berdasarkan Ruang

Ruang Sidang 1 - (3)
17/Pdt.G/2019/PN Mjl --> Masih sidang

Ruang Sidang 2 - (0)
Tidak digunakan

Ruang Sidang Anak - (0)
Tidak digunakan

Ruang Mediasi - (0)
Tidak digunakan

Kosongkan Ruang
(Sidang Kemarin)

[Log Out](#)

:: Antrian Sidang Pengadilan Pengadilan Negeri Majalengka ::

- Antrian Sidang Pengadilan Negeri Majalengka

Ruang Sidang 1

No	Detail Perkara	Status Pihak	Aksi
1	17/Pdt.G/2019/PN Mjl Ruang : Ruang Sidang Kartika Agenda : SIDANG PERTAMA Perk.Jam Sidang : 11:00 WIB Hakim Ketua: Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Ria Agustien, S.H. Hakim Anggota 2: Ida Adriana, S.H. Panitera Pengganti: Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.	Pihak Siap	Selesai Panggil Ulang Pindah Ruang Ubah Jam
2	253/Pid.B/2019/PN Mjl Ruang : Ruang Sidang Kartika Agenda : SIDANG PERTAMA Perk.Jam Sidang : 13:00 WIB Hakim Ketua: Eti Koerniati, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Kopsah, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Dikdik Haryadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti: Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.	Pihak Belum Siap	Pindah Ruang Ubah Jam
3	49/Pdt.P/2019/PN Mjl Ruang : Ruang Sidang Kartika Agenda : Pemeriksaan saksi Perk.Jam Sidang : 10:15 WIB Hakim Tunggal: Agusta Gunawan, S.H. Panitera Pengganti: Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.	Pihak Siap	Pindah Ruang Ubah Jam

[Kembali](#)

:: Antrian Sidang Pengadilan Pengadilan Negeri Majalengka ::

- Antrian Sidang Pengadilan Negeri Majalengka

::| Sedang Berlangsung Hari ini Tanggal : 07-01-2020|::

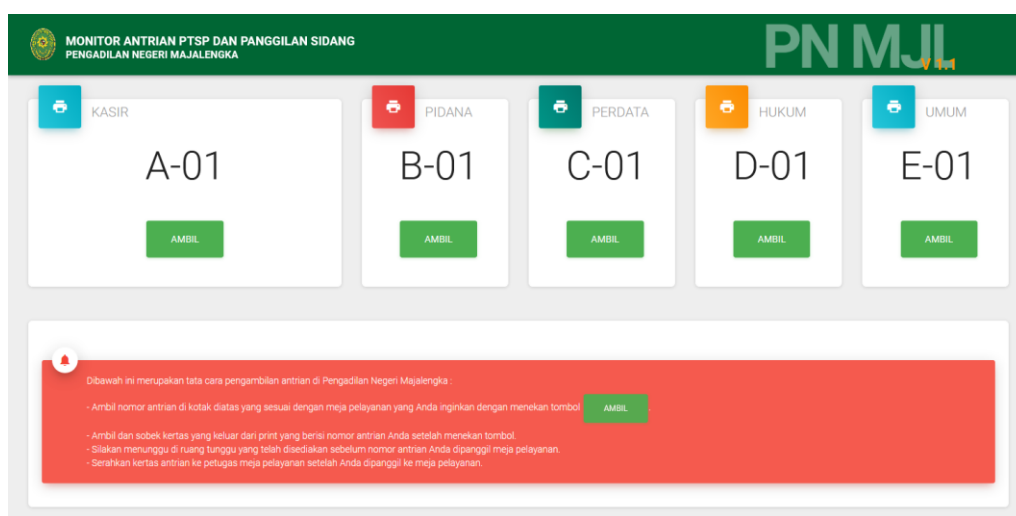
Ruang Sidang 1 17/Pdt.G/2019/PN Mjl	Ruang Sidang 2 Tidak digunakan
RUANG Ruang Sidang Anak Tidak digunakan	Ruang Mediasi Tidak digunakan

:: Antrian Sidang Pengadilan Pengadilan Negeri Majalengka ::

Kemudian setelah pihak siap, panitera pengganti baru bisa menekan tombol panggil kepada para pihak. Selain kepada para pihak, panggilan tersebut juga kepada para hakim, jaksa, dan panitera pengganti pada perkara tersebut.

Dengan adanya aplikasi tersebut, mempercepat pelayanan kepada para pihak karena tidak perlu mencari-cari orang baik itu hakim, PP, Jaksa, ataupun para pihak yang terkadang memerlukan lebih banyak waktu karena tidak diketahui sedang berada di ruangan mana.

3. Aplikasi Antrian PTSP



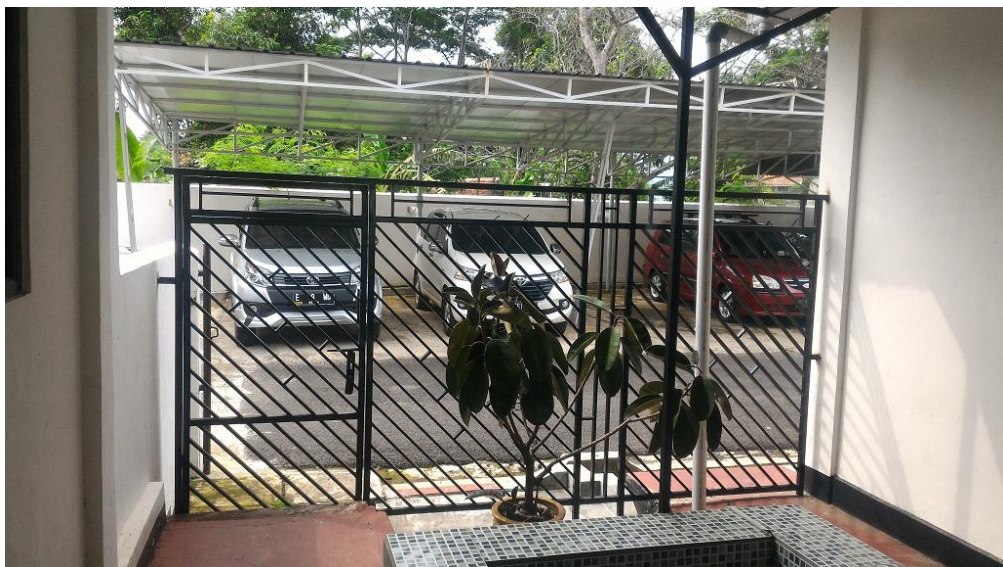
Aplikasi Antrian PTSP adalah aplikasi untuk para penerima layanan yang dilakukan melalui Meja PTSP. Diharapkan dengan adanya aplikasi Antrian PTSP tersebut, para penerima layanan bisa selalu tertib dalam menunggu gilirannya tanpa perlu lelah mengantri sambil berdiri karena sebanyak apapun penerima layanan yang hadir, akan dipanggil sesuai urutan atau nomor antrian yang dituju.

4. Pembatas area pengunjung dengan area pegawai.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Negeri Majalengka memisahkan area antara area Pengunjung dengan area Pegawai. Pemisahan tersebut dilakukan dengan dipasang teralis pemisah diantara kedua area tersebut.

Diharapkan dengan adanya pembatas, bisa menambah kepercayaan masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Majalengka

adalah Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).





BAB VI

Pengawasan

A. Internal

❖ ***Ruang Lingkup Pengawasan***

1. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.
2. Sasaran pengawasan: aparat Pengadilan Negeri.

❖ ***Bentuk Pengawasan***

1. Pengawasan langsung: dengan cara pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus.
2. Pengawasan tidak langsung: dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa.

❖ ***Bentuk Pengawasan***

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
3. Pengawasan terhadap perilaku aparat pengadilan.
4. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik.

❖ ***Pengawasan dibidang Teknis Administrasi***

1. **Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri** terhadap:
 - 1.1 Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri:
 - ✓ Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri.
 - ✓ Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri.

- ✓ Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas hakim dan pegawai di pengadilan negeri.

1.2 Hakim, Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana dan Hakim Pengawas Bidang:

- ✓ Tenggang waktu penyelesaian perkara pidana:
- ✓ Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan.
- ✓ Penyelesaian/minutesi perkara.
- ✓ Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat.
- ✓ Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata:
- ✓ Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992.
- ✓ Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP.
- ✓ Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata.
- ✓ Menerima laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, serta Hakim Pengawas Bidang.

1.3 Panitera

- ✓ Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP.
- ✓ Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara.
- ✓ Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan grosse acte, termasuk eksekusi berdasarkan delegasi dari pengadilan negeri lain.
- ✓ Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari kejaksaan.
- ✓ Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan pidana, serta konsignasi.

1.4 Sekretaris

- ✓ Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- ✓ Memantau pelaksanaan DIPA.
- ✓ Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
- ✓ Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen.
- ✓ Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala sub bagian.
- ✓ Memantau pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, keamanan dan ketertiban.

2 Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

- 2.1 Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera dan Sekretaris serta jajaran Pegawai pada Pengadilan Negeri.
- 2.2 Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata.
- 2.3 Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri.
- 2.4 Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4Juni 2009.
- 2.5 Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum.

3. Pengawasan Hakim Bidang terhadap Para Kepala Sub Bagian atau kepada Para Pan Mud

- 3.1 Bahwa Para Hakim Pengawas Bidang masing masing mengawasi Bidang nya masing masing sesuai SOP

4. Pengawasan oleh Panitera terhadap :

- 4.1 Panitera Muda Perdata
 - ✓ Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
 - ✓ Memantau Penyelesai Perkara Perdata Gugatan
 - ✓ Memantau Penyelesai Perkara Perdata Banding

- ✓ Memantau Penyelesai Perkara Perdata Kasasi
- ✓ Memantau Penyelesai Perkara Perdata Peninjauan Kembali
- ✓ Memantau Penyelesai Perkara Perdata Permohonan
- ✓ Memantau Penyelesai Perkara Konsinyasi
- ✓ Memantau Penyelesai Perkara Perdata Eksekusi
- ✓ Memantau Penyelesai Perkara Perdata Gugatan Sederhana
- ✓ Memantau Penyelesai Perkara Perdata Gugatan Keberatan BPSK/KPPU/ARBITASE
- ✓ Memantau Penyelesai Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti

4.2 Panitera Muda Pidana

- ✓ Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Pidana Biasa
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Pidana Singkat
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Pidana Cepat, Tipiring dan Lalu Lintas
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Praperadilan
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Yang Banding
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Yang Kasasi
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Yang Grasi
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Peninjauan Kembali
- ✓ Memantau Penanganan Izin / Persetujuan Penyitaan / Penggeladahan Penahanan/Perpanjangan Penahanan
- ✓ Memantau Penanganan Perkara Pidana Anak
- ✓ Memantau Permohonan Penetapan Diversi

4.3 Panitera Muda Hukum

- ✓ Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- ✓ Memantau Penyelesaia Pelaporan Perkara
- ✓ Memantau Pengarsipan Perkara
- ✓ Memantau Pelayanan Informasi Publik

- ✓ Memantau Pelayanan Dokumentasi Perkara
- ✓ Memantau Pelayanan Salinan Putusan
- ✓ Memantau Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah Berperkara
- ✓ Memantau Pelayanan Surat Kuasa Insidentil
- ✓ Memantau Legalisasi Surat /Akta Dibawah Tangan (Warmeking)
- ✓ Memantau Pendaftaran Badan Hukum
- ✓ Memantau Penanganan Pengaduan

5. Pengawasan Sekretaris Terhadap :

5.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- ✓ Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- ✓ Memantau Penyelesaian Surat Masuk
- ✓ Memantau Penyelesaian Surat Keluar
- ✓ Memantau Pengelolaan / Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN)
- ✓ Memantau Pengelolaan Perpustakaan
- ✓ Memantau dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak/Honor
- ✓ Memantau Pembayaran Gaji , Uang Makan Remonerasi Uang makan
- ✓ Memantau Pembelian Belanja Barang dan Belanja Modal / Pengadaan

5.2 Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

- ✓ Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- ✓ Memantau Pengusulan Kenaikan Pangkat
- ✓ Memantau Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
- ✓ Memantua Pengusulan Pensiun
- ✓ Memantau Update Data Pada Aplikasi SIMPEG
- ✓ Memantau Update Data Pada Aplikasi SIKEP
- ✓ Memantau Update Data Pada Aplikasi KOMDANAS
- ✓ Memantau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

- ✓ Memantau Pengerjaan SKP
- ✓ Memantau Update Data Pada Aplikasi E-PUPNS

5.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

- ✓ Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
- ✓ Memantau Menyusun RK-AKL / Perencanaan Anggaran dan Kegiatan
- ✓ Memantau Membuat Laporan Bulanan
- ✓ Memantau Membuat Laporan BMN
- ✓ Memantau Membuat Laporan Keuangan
- ✓ Memantau Membuat Laporan Tahunan
- ✓ Memantau Membuat Laporan SAKIP
- ✓ Memantau Pengelolaan Website
- ✓ Memantau Pengelolaan Server

B. EVALUASI

Dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan baik dari hakim pengawas bidang maupun dari hakim pengawas daerah Pengadilan Tinggi Bandung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Majalengka berusaha terus untuk melakukan pembenahan-pembenahan sesuai dengan saran, arahan dan temuan dari pengawasan dan pemeriksaan tersebut.

BAB VII

Penutup

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas.

B. REKOMENDASI

1. Pada saat ini tenaga Kontrak di Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II berjumlah 9 (sembilan) orang **“Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat kontribusi mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II sangat besar”**.
2. Mengingat hingga saat ini Kendaraan dinas Roda 4 (empat) hanya ada 2 (dua) unit. Maka kami mengharapkan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan anggaran untuk Pengadaan Kendaraan Dinas

Roda 4 (empat) pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II sehingga kegiatan operasional semakin lancar.

Demikian Laporan Tahunan 2019 (Periode 1 Januari – 31 Desember 2019) Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

